

Persepsi Pemuda Terhadap Kepemimpinan Politisi Partai Aceh di Lembaga Eksekutif dan Legislatif

(Studi pada Organisasi kepemudaan Aceh)

Munawar

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Politik
Universitas Nasional Jakarta
munawarakbal@gmail.com

ABSTRACT

Aceh Party is one of local political party which listed on Aceh Government Constitution (UUPA) Number 11, 2006 about Local Political Party. The leadership of Executive and Legislative Institution was being controlled by Aceh Party politicians since 2009 to present, thus raising various perceptions of society and youth in particular to the leadership of Aceh Party. Theory of Symbolic Interactionism is used to analyze the problems in this thesis. The study aimed to determine the youth perception to the leadership of Aceh Party politicians in Executive and Legislative. The study was using descriptive qualitative method. The datas were collected by the interview and documentation. The results show that the leadership of Aceh Party politicians in the executive and legislative has not been in line with the expectations of the Acehnese, because they have not been able to solve the problems that occur, such as poverty, unemployment, and public prosperity. On the other hand, Aceh gained special autonomy which has large budgets. The leadership of the Aceh Party politicians must be able to bring the change towards a better, productive, open not exclusive, and focus on the public prosperity, and also objectify the points which listed on Aceh Government Constitution Number 11, 2006.

Keywords : *Leadership, Aceh of Party, The Youth Perception.*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin menjelaskan persepsi pemuda terhadap kepemimpinan Partai Aceh. Argumentasi utama reaksi dan persepsi pemuda terhadap Kepemimpinan Partai Aceh di lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif. Argumentasi utama bahwa kajian ini akan melihat objektivitas penilaian pemuda terhadap kepemimpinan partai Aceh yang secara mayoritas menguasai perolehan kursi di legislatif dan mampu memenangkan kader partai Aceh menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Semenjak pasca konflik Aceh ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11

tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Undang-undang tersebut mengatur kewenangan Aceh secara khusus termasuk kewenangan yang mengakui adanya Partai Lokal Aceh yang berbeda dengan Provinsi lain.

Secara khusus Partai Lokal di Aceh di atur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal.² Keterlibatan partai Politik Lokal Aceh menjadi peserta pemilu pada Tahun 2009 yang diikuti 6 (Enam) Partai, yaitu Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA). Sedangkan di Tahun 2014 partai politik lokal yang menjadi peserta pemilu yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA) sebagai peserta Pemilu Legislatif 2014.³ Dari hasil pemilu pada tahun 2009 dan 2014 Partai Aceh berhasil memenangkan pemilu dan juga mengatakan kader Partai Aceh sebagai pememenang pemilihan Kepala Daerah periode 2012-2017 yaitu dengan terpilihnya Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Kepemimpinan kader Partai Aceh baik di tingkat Legislatif maupun Esekutif mengundang berbagai reaksi tanggapan dan persepsi dari masyarakat baik masyarakat yang pro maupun yang kontra, begitu juga dikalangan pemuda ada yang mempersepsikan bahwa kepemimpinan kader Partai Aceh sudah memenuhi standar harapan masyarakat, dan ada juga yang mempersepsikan bahwa kepemimpinan keduanya masih jauh dari harapan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan.

Stigma penilaian mengenai kepemimpinan elite Partai Aceh terus berkembang dikalangan pemuda. Sehingga penilaian objektivitas pemuda diharapkan mampu memberikan masukan kepada elit Partai Aceh dalam memimpin baik di tingkat Legislatif maupun di Esekutif. Apalagi Pemuda dikenal sebagai pelopor perubahan yang tidak dapat melepaskan diri dari politik. Pemuda adalah *zoon politicon* atau mahluk politik yang merupakan bagian dari produk politik baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Dengan demikian, perlu untuk mengkaji secara mendalam terkait Persepsi Pemuda terhadap Kepemimpinan Partai Aceh di Lembaga Legislatif dan Esekutif

¹ . Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

² . Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh

³ . Lihat data hasil seleksi peserta pemilu oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh pada pemilu Tahun 2009 dan 2014

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Penelitian ini akan berupaya menggambarkan persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data kemudian akan di analisis melalui tiga alur yakni; *Pertama*, reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuat kategorisasi serta membuat memo dan rekaman, sehingga data dari informan lebih teratur dan sistematis. *Kedua*, penyajian data yaitu susunan informasi yang diperoleh berupa deskripsi untuk menganalisis data tersebut. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dari berbagai hal yang akan ditemui dalam pengumpulan data mengenai Persepsi Pemuda terhadap Kepemimpinan Politisi Partai Aceh di Lembaga Eksekutif dan Legislatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas teori yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini, menganalisis tentang persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif serta hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif berdasarkan persepsi pemuda.

Dalam menemukan sikap dan perilaku pemimpin akan tergambarkan melalui anggapan, reaksi serta persepsi masyarakat, berdasarkan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dalam buku teori sosiologi modern.⁴ Unit studi adalah “tindakan” yang terdiri dari aspek tersembunyi dan yang terbuka dari tindakan manusia. Didalam tindakan itulah semua kategori psikologi tradisional dan ortodoks menemukan tempatnya. Katagori tersebut ialah perhatian, persepsi, imajinasi, alasan, emosi, dan tindakan.

Katagori itu akan memunculkan berbagai pandangan reaksi serta persepsi. Menurut Mead. Persepsi melibatkan rangsangan yang baru masuk maupun citra mental yang

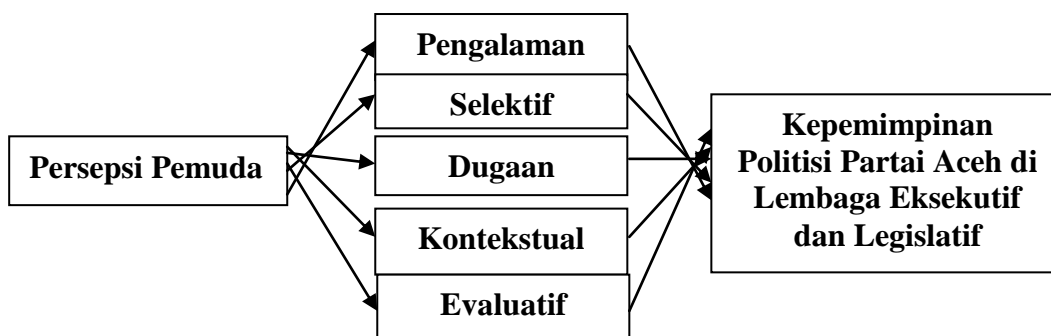
⁴ . Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2011). *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana, hal 268

ditimbulkannya.⁵ Sedangkan menurut Mulyana.⁶ Persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyajian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Mulyana menjelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya yang berkaitan dengan persepsi sosial, yang dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip ini mempengaruhi persepsi yang dilakukan manusia diantaranya berdasarkan pengalaman, selektif, dugaan, kontekstual dan evaluatif.⁷

Persepsi juga akan dipengaruhi oleh model dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk memengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.⁸ Pola dan gaya kepemimpinan seseorang akan berpengaruh kepada penilaian dan persepsi masyarakat yang melihat secara objektif terhadap kinerja seorang pemimpin melalui gaya dan tipologi kepemimpinan itu sendiri.

Berdasarkan landasan teori di atas yaitu teori interaksionisme simbolik, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh dapat dilihat berdasarkan pengalaman, selektif, dugaan, kontekstual, dan evaluatif. Adapun *output* yang dihasilkan dari penelitian ini berupa deskripsi/gambaran kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif menurut persepsi pemuda di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Aceh.

Gambar Kerangka Berfikir



⁵. Ibid. Hal 275

⁶. Mulyana, Deddy. (2000). *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 180

⁷. Ibid. hal 191

⁸. Soerjono Soekanto.(2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*.Edisi Baru. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. Hal 250

Menyangkut penelitian ini, maka dapat dijelaskan landasan konseptual sebagaimana yang terlihat pada gambar diatas, berikut penjelasannya:

Pengalaman, pemuda melihat kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif didasari pada pengalaman dan pembelajaran terdahulu yang pernah dialami oleh pemuda selama para pemimpin politisi Partai Aceh memimpin, kemudian pemuda melihat dan memberikan persepsinya terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh didasarkan pada pengalaman politisi Partai Aceh dalam memimpin di eksekutif dan legislatif.

Selektif, pemuda menafsirkan pandangannya terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh dilihat pada sikap selektif pemimpin politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif dalam memimpin.

Dugaan, pemuda memberikan pandangannya terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh berdasarkan keadaan/kondisi politisi Partai Aceh dalam memimpin di eksekutif dan legislatif, pemuda memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh dan Partainya berdasarkan kepemimpinan yang sedang dijalankan oleh pemimpin politisi Partai Aceh di eksekutif dan legislatif.

Kontekstual, pemuda melihat kepemimpinan politisi Partai Aceh dengan mengaitkan apakah kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif saat ini memimpin sudah sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Berdasarkan keadaan dilapangan maka pemuda memberikan pandangannya terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh yang sedang memimpin di eksekutif dan legislatif.

Evaluatif, pemuda menafsirkan pandangannya terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh dilihat dari sikap evaluatif kinerja pemimpin politisi Partai Aceh dalam memimpin di eksekutif dan legislatif.

Persepsi Pemuda Terhadap Kepemimpinan Politisi Partai Aceh di Lembaga Eksekutif dan Legilatif⁹

Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif menimbulkan berbagai persepsi dikalangan tokoh-tokoh pemuda para ketua organisasi kepemudaan di

⁹ . hasil analisis wawancara dengan ketua Organisasi Kepemudaan Aceh. Lihat dalam skripsi Munawar. (2016). Persepsi Pemuda terhadap Kepemimpinan Politisi Partai Aceh di Lembaga Eksekutif dan Legislatif . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Syiah Kuala.

Kota Banda Aceh, Partai Aceh adalah partai yang berkuasa di Aceh, sehingga kepemimpinan di eksekutif dan legislatif dikuasai oleh politisi dari Partai Aceh. Oleh sebab itu, persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh dapat dilihat berdasarkan pengalaman, selektif, dugaan, kontesktual dan evaluatif.

Persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif dilihat berdasarkan pengalaman, maka para ketua-ketua organisasi memberikan tanggapan bahwa kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif masih jauh dari harapan dalam kinerjanya, selalu terjebak dengan masalah internal dan isu-isu lokal sehingga banyak tugas-tugas eksekutif dan legislatif yang semestinya menyelesaikan problem-problem di Aceh untuk mensejahterakan masyarakat Aceh belum sepenuhnya terlaksana serta kurang terbuka dengan pemuda hanya saja keterbukaan di saat ada kepentingan timbal balik.

Persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif dilihat berdasarkan selektif, maka para ketua-ketua organisasi memberikan tanggapan sesuai dengan sudut pandang masing-masing bahwa kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif belum selektif kalau di lihat dari sisi pengesahan APBA untuk Tahun 2016, terjadi tarik menarik dalam pengesahan anggaran dan hampir di *Pergubkan* (Peraturan Gubernur) anggaran APBA tahun 2016. Kepemimpinan politisi Partai Aceh terkesan sangat eksklusif terhadap penempatan posisi dalam kepemimpinan artinya tidak profesional hanya mengambil orang-orang dekat dari lingkaran mereka, dan tidak membuka ruang bagi para pemuda untuk berkiprah didalam Partai Aceh.

Berdasarkan pengalaman dan sikap selektif kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif dalam memimpin maka beberapa ketua organisasi di Kota Banda Aceh menduga terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh dan memberi tanggapan bahwa kepemimpinan politisi Partai Aceh belum mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, tidak akurnya pucuk pimpinan, tidak dikelola dengan baik kepemimpinan selama ini, sehingga akan berefek untuk Partai Aceh itu sendiri, tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan meninggalkan pemimpin dari Partai Aceh mencari pemimpin dari partai lain. Hal ini akan mengakibatkan Partai Aceh akan kehilangan eksistensinya dan menjadi partai kecil nantinya di Aceh.

Partai Aceh adalah partai yang baru berproses lebih kurang selama 8 tahun, Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif secara kontekstual kepemimpinan politisi Partai Aceh sudah dalam kategori mendekati sempurna tapi belum sempurna sehingga politisi Partai Aceh masih banyak kekurangan dalam memimpin. Namun demikian kedepan kepemimpinan politisi Partai Aceh harus lebih baik lagi dari kepemimpinan yang sekarang.

Kepemimpinan politisi Partai Aceh memimpin selama ini secara kontekstual masih banyak janji-janji kampanye saat mencalonkan diri yang belum direalisasikan, masih sangat kekurangan dalam hal berkomunikasi dengan baik, sehingga kepemimpinan mereka patut dipertanyakan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh selama dua periode kepemimpinan politisi Partai Aceh memimpin baik di eksekutif maupun di legislatif.

Kepemimpinan politisi Partai Aceh secara evaluatif masih belum sempurna karena masih banyak butir-butir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 belum terlaksana, walaupun secara fungsi eksekutif dan legislatif menjalankan fungsinya masing-masing namun di legislatif sangat sedikit menghasilkan produk hukum padahal di legislatif 29 kursi dari 81 kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diduduki oleh politisi Partai Aceh.

Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas sosial yang ada disekelilingnya. Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda-beda di kalangan tokoh-tokoh pemuda para ketua organisasi kepemudaan di Kota Banda Aceh walaupun objeknya sama (Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif) namun, banyak kemiripan persepsi pemuda para ketua organisasi kepemudaan di Kota Banda Aceh terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif.

Kesejahteraan Masyarakat Aceh Pandangan Pemuda

Kesejahteraan masyarakat Aceh menjadi tujuan utama dalam pembangunan, Pemerintah Aceh dalam setiap pengambilan kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan bangsa, pemuda dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan gagasan yang

berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat Aceh dalam pandangan tokoh pemuda dibeberapa organisasi kepemudaan (KNPI Aceh, SAPMA PP Aceh, Pemuda Muhammadiyah Aceh, Gerakan Pemuda Ansor Aceh dan Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh).¹⁰ Memberikan pandangan bahwa Eksekutif dan legislatif saat ini dipimpin oleh politisi Partai Aceh masih kurang fokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Hal ini dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Aceh.

Tabel: Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh, 2012-2014

Wilayah	2012		2013		2014	
	Maret		Maret		Maret	
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
ACEH	909.04	19.46	842.42	17.6	881.26	18.05

Sumber:¹¹ BPS Provinsi Aceh 2015

Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Serambi Indonesia pada 16 September 2015 bahwa target Pemerintah Aceh ingin menurunkan penduduk miskin 2 persen setahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2017. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Aceh pada bulan Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau bertambah 14.000 orang dibanding pada bulan September 2014. Data yang dirilis secara periodik oleh BPS Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada posisi Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau 17,08 persen. Artinya, bertambah sebanyak 14.000 orang bila dibandingkan dengan September 2014 yang jumlahnya 837.000 orang atau 16,98 persen.¹²

¹⁰ . Hasil Wawancara dengan ketua Organisasi kepemudaan KNPI Aceh, SAPMA PP Aceh, Pemuda Muhammadiyah Aceh, Gerakan Pemuda Ansor Aceh dan FPMPA

¹¹ . Lihat di Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2015

¹² . <http://aceh.tribunnews.com/2015/09/16/warga-miskin-di-aceh-bertambah>.diakses pada 18 juli 2016). Di akses pada Tanggal 26 Juni 2016

Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif belum sesuai dengan harapan masyarakat Aceh karena belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh, seperti mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan pengalokasian anggaran masih belum tepat sasaran.

Pengaruh Kepemimpinan Politisi Partai Aceh di Eksekutif dan Legislatif menurut Persepsi Pemuda¹³

Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif menurut persepsi pemuda dalam pandangan beberapa Ketua Organisasi Kepemudaan di Kota Banda Aceh tentu ada beberapa hal yang mempengaruhi kepemimpinan politisi Partai Aceh. Hal ini disebabkan karena timbulnya berbagai persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh yang memimpin berdasarkan pengalaman, selektif, dugaan, kontekstual dan evaluatif, sehingga Ketua Organisasi Kepemudaan memberi tanggapan terhadap hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif sebagai berikut:

a. Gaya Kepemimpinan

Pemimpin mempunyai kebiasaan, sifat, watak dan kepribadian yang khas. Sehingga tingkah laku dan gayanya dalam aktivitas sehari-hari yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya pasti akan selalu mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Kepemimpinan seorang politisi Partai Aceh sangat berpengaruh pada gaya kepemimpinan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemimpin yang telah di enbankan amanah oleh masyarakat Aceh demi mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, gaya kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif yang sedang memimpin periode ini dalam pandangan pemuda diorganisasi kemasyarakatan pemuda, pemimpin politisi Partai Aceh saat berada dalam birokrasi pemerintahan dan parlemen masih terbawa gaya saat mereka memimpin partai sangat eksklusif dan arogan yang membuat pola komunikasi susah untuk membangun *networking* (jaringan) dengan Partai Nasional (Parnas) dan pemerintah pusat sehingga akan berefek terhadap elektabilitas dan eksistensi Partai Aceh itu sendiri.

¹³ . Lihat dalam skripsi Munawar. (2016). *Persepsi Pemuda terhadap Kepemimpinan Politisi Partai Aceh di Lembaga Eksekutif dan Legislatif*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Syiah Kuala.

Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif terjadi konflik internal antara Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai politisi Partai Aceh yang menandakan bahwa kepemimpinan politisi Partai Aceh terjadi ketidak harmonisan antara pimpinan dengan wakil pimpinan, hal ini menandakan tipologi kepemimpinan politisi Partai Aceh di eksekutif dalam pandangan pemuda di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda menjalankan tipologi kepemimpinan yang sifatnya mengarah kepada tipe kepemimpinan yang otoriter dan militeristis.

Tipe otoriter ialah tipe pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan tanpa memberikan kesempatan pada bawahannya menganggap bawahannya sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik saran dan pendapat. Sedangkan tipe militeristis ialah pemimpin yang mengerakkan bawahannya bergantung pada pangkat dan jabatannya sebagai pimpinan.¹⁴ Hal ini terlihat dimiliki oleh Gubernur sebagai pimpinan di eksekutif dan Wakil Gubernur sebagai wakil pimpinan eksekutif dan juga pimpinan Partai Aceh.

Tipologi kepemimpinan politisi Partai Aceh yang sifatnya otoriter dan militeristis terlihat kepemimpinan yang arogansi dan eksklusif membuat para pemuda dan masyarakat kalangan bawah dalam pandangan pemuda di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda kehilangan kesempatan untuk berkiprah dalam partai dan sayap-sayap Partai Aceh. Hal ini akan membuat peran pemuda sebagai dinamisator, katalisator, motivator, inovator dan evaluator tidak berfungsi semestinya sehingga proses pembangunan, perubahan dan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat Aceh tidak akan terwujud.¹⁵

Peran pemuda sebagai dinamisator yaitu sebagai penggerak, karena pemuda mempunyai pikiran-pikiran kreatif, inovatif dan desduktif untuk penyelesaian persoalan yang terjadi di Aceh baik persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, ekonomi dan politik tentu sangat dibutuhkan. Peran pemuda sebagai katalisator yaitu sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan dalam merawat perdamaian Aceh demi perkembangan pembangunan Aceh.

¹⁴ . Cecep, Hidayat. (2015). *Kepemimpinan Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Buku dan Artikel karya Iskandar Putong

¹⁵ . Taufiq, M. (2013). Peran Pemuda dalam Pembangunan.
<http://www.unmabanten.ac.id/index.php/kumpulan-artikel-opini/118-peran-pemuda-dalam-pembangunan#>. Diakses pada November 2016.

Pemuda sebagai motivator yaitu sebagai pendorong percepatan pembangunan, karena pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja. Pemuda sebagai inovator yaitu pemuda dengan jiwa yang tidak pernah merasa puas terhadap satu keberhasilan, sehingga mencari dan mengumpulkan keberhasilan-keberhasilan sebanyak mungkin untuk kemajuan. Pemuda sebagai evaluator yaitu pemuda sebagai intelektual muda sudah sepatutnya mengontrol secara efektif terhadap kegiatan pembangunan di Aceh.

Pemimpin politisi Partai Aceh berdasarkan uraian diatas harus merekrut pemuda-pemuda Aceh untuk membuat perubahan dan menyelesaikan persoalan kemiskinan, pendidikan, ekonomi dan politik di Aceh serta membantu menjaga eksistensi Partai Aceh demi mewujudkan cita-cita Partai dan cita-cita masyarakat Aceh, oleh karena itu pemimpin politisi Partai Aceh harus menjalankan tipologi kepemimpinan yang demokratis yaitu terbuka tidak eksklusif dan arogansi sehingga semua aspirasi masyarakat Aceh terserap dan terealisasi demi kemajuan dan kesejahteraan Aceh.

b. Keseriusan dalam Memimpin

Keseriusan dalam memimpin menjadi suatu hal yang paling utama bagi seorang pemimpin, jika seorang pemimpin fokus dalam memimpin maka apa yang dipimpin akan tercapai semua tujuan bersama. Pemimpin politisi Partai Aceh sangat dibutuhkan sikap keseriusan dan fokus dalam memimpin Aceh dengan merealisasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 sepenuhnya, dan jika hal ini terwujud maka sudah bisa dipastikan bahwa masyarakat Aceh akan menambah kepercayaannya terhadap pemimpin politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif.

c. Sikap dalam Mengambil Kebijakan

Sikap dalam mengambil suatu kebijakan seorang politisi Partai Aceh juga menjadi pengaruh terhadap kepemimpinannya, karena jika sikap yang diambil oleh pemimpin politisi Partai Aceh tepat sasaran tentu masyarakat Aceh akan sejahtera dan taraf hidup masyarakat Aceh akan meningkat, sehingga kepercayaan dan dukungan masyarakat Aceh terhadap pemimpin politisi Partai Aceh terus meningkat dan bertambah.

d. Komunikasi Politik

Menurut Sigmund Neumann,¹⁶ dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Kemampuan komunikasi politik dalam membangun jaringan bagi pemimpin politisi Partai Aceh sangat dibutuhkan baik dalam membangun hubungan dengan Partai Nasional (Parnas) maupun hubungan dengan pemerintah pusat. Hal ini akan berefek baik untuk pemimpin politisi Partai Aceh jika pola komunikasinya elegan sehingga menarik perhatian masyarakat Aceh untuk mendukung kepemimpinan politisi Partai Aceh.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Persepsi pemuda terhadap kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif dilihat berdasarkan pengalaman, selektif, dugaan, kontekstual dan evaluatif maka kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif belum sesuai dengan harapan masyarakat Aceh, kinerja mereka dianggap yang belum mampu menyelesaikan problem-problem di Aceh seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif terjadi ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga visi misi utama saat mereka mencalonkan diri tidak terealisasikan secara baik.

Kedua, Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan politisi Partai Aceh di lembaga eksekutif dan legislatif menurut persepsi pemuda diorganisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) adalah sebagai berikut: (1). Gaya Kepemimpinan politisi Partai Aceh sifatnya mengarah kepada tipe kepemimpinan yang otoriter dan militeristis, terkesan sangat eksklusif dan arogansi sehingga sulit untuk membangun Aceh, (2). Tidak ada keseriusan politisi Partai Aceh dalam memimpin, (3). Sikap politisi Partai Aceh dalam mengambil kebijakan

¹⁶ . Neuman, Sigmund. (1963). "Modern Political Parties". Dalam *Comparative Politics: a Reader*, eds. Herry Eckstein dan David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe. Hal 352

cenderung mengarah kepada kepentingan kelompok, (4). Komunikasi politik Politisi Partai Aceh masih kurang efektif dalam membangun komunikasi antara sesama politisi partai

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep, Hidayat. (2015). *Kepemimpinan Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Buku dan Artikel karya Iskandar Putong
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/09/16/warga-miskin-di-aceh-bertambah>.diakses pada 18 juli 2016). Di akses pada Tanggal 26 Juni 2016
- La Torre, C., & Montalto, K. (2016). Transmigration, Multiculturalism and Its Relationship to Cultural Diversity in Europe. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 39-52. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.84
- Mulyana, Deddy. (2000). *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munawar. 2016. Persepsi Pemuda terhadap Kepemimpinan Politisi Partai Aceh di Lembaga Eksekutif dan Legislatif . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Syiah Kuala.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Neuman, Sigmund. (1963).“Modern Political Parties”. Dalam *Comparative Politics:a Reader*,eds. Herry Eckstein dan David E.Apter. London: The Free Press of Glencoe
- Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2011). *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.

Taufiq, M. (2013). Peran Pemuda dalam Pembangunan. <http://www.unmabanten.ac.id/index.php/kumpulan-artikel-opini/118-peran-pemuda-dalam-pembangunan#>. Diakses pada November 2016.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.